SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
b. bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 010, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Morowali Utara Nomor 011);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan Desentralisasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten.

14. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh setiap Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan oleh APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Penghasilan Tetap bagi perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Jumlah dana yang di alokasikan berjumlah Rp 58.259.164.500,- (Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dan diperuntukan bagi 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Desa yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan di Morowali Utara.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Utara di tentukan berdasarkan penjumlahan dari perhitungan ADD Minimal dan Proposional.

1. ADD Minimal merupakan dana yang di alokasikan secara merata keseluruh Desa yang jumlahnya 90% (Sembilan Puluh Persen) dari keseluruhan ADD.
2. ADD Proposional merupakan dana yang di alokasikan berdasarkan 4 (empat) Indikator dari keseluruhan ADD.
3. Pembagian ADD Proposional berdasarkan 4 (empat) subindikator sebagai berikut:

W = Alokasi Dasar + {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)}
Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa

Pasal 5

Daftar penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 dan penetapan jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 12 Februari 2016

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 12 Februari 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MOCH. AMIRULLAH SIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 4
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2016

ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MOROWALI UTARA
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA TIAP DESA			NOMOR REKENING
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN	JUMLAH DANA DESA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)	
I	**KECAMATAN PETASIA**				
1	GANDA-GANDA	429,780,000	61,188,181	490,968,181	401.02.02.01528-1
2	KOYA	429,780,000	41,602,618	471,382,618	401.02.02.01533-3
3	GILILANA	429,780,000	50,995,118	480,775,118	401.02.02.01529-2
4	TANAUGE	429,780,000	32,228,584	462,008,584	401.02.02.01539-5
5	KOROLOLAKI	429,780,000	41,590,986	471,370,986	401.02.02.01592-1
6	KOROLOLAMA	429,780,000	24,956,116	454,736,116	401.02.02.01563-2
7	KOROMATANTU	429,780,000	57,632,401	487,412,401	401.02.02.01532-0
II	**KECAMATAN PETASIA BARAT**				
1	TIU	429,780,000	40,015,446	469,795,446	401.02.02.01547-4
2	TONTOWEA	429,780,000	58,247,135	488,027,135	401.02.02.01549-8
3	TOGO MULYO	429,780,000	70,043,322	499,823,322	401.02.02.01548-6
4	MARALEE	429,780,000	25,975,559	455,755,559	401.02.02.01537-0
5	MONDOWE	429,780,000	35,577,042	465,357,042	401.02.02.01541-2
6	SAMPALOWO	429,780,000	33,946,601	463,726,601	401.02.02.01581-4
7	MOLEONO	429,780,000	39,949,302	469,729,302	401.02.02.01539-5
8	ONEPUTE	429,780,000	34,887,664	464,667,664	401.02.02.01574-7
9	ULU LAA	429,780,000	42,984,975	472,764,975	401.02.02.01622-2
10	TADAKU JAYA	429,780,000	30,082,313	459,862,313	401.02.02.01618-0
III	**KECAMATAN PETASIA TIMUR**				
1	BUNTA	429,780,000	87,533,489	517,313,489	401.02.02.01525-4
2	TOMPIRA	429,780,000	74,725,584	504,505,584	401.02.02.01605-2
3	BUNGINTIMBE	429,780,000	79,583,533	509,363,533	401.02.02.01524-2
4	TOWARA	429,780,000	85,686,598	515,466,598	401.02.02.01550-3
5	MOLINO	429,780,000	47,228,970	477,008,970	401.02.02.01572-3
6	MOHONI	429,780,000	67,260,170	497,040,170	401.02.02.01538-3
7	UNGKEA	429,780,000	27,812,130	457,592,130	401.02.02.01544-8
8	BIMOR JAYA	429,780,000	34,147,805	463,927,805	401.02.02.01522-8
9	MOLORES	429,780,000	36,245,312	466,025,312	401.02.02.01540-1
10	KEUNO	429,780,000	31,452,886	461,232,886	401.02.02.01531-9
11	TOWARA PANTAI	429,780,000	36,567,349	466,347,349	401.02.02.01620-8
12	PEBOA	429,780,000	35,210,856	464,990,856	401.02.02.01616-7
IV	**KECAMATAN LEMBO RAYA**				
1	DOLUPO KARYA	429,780,000	52,447,073	482,227,073	401.02.02.01526-6
2	PO'ONA	429,780,000	29,051,513	458,831,513	401.02.02.01637-5
3	PETUMBEA	429,780,000	38,489,446	468,269,446	401.02.02.01543-6
4	RONTA	429,780,000	47,976,759	477,756,759	401.02.02.01638-7
5	PONTANGOA	429,780,000	31,349,954	461,129,954	401.02.02.01636-3
6	JAMOR JAYA	429,780,000	48,428,205	478,208,205	401.02.02.01624-6
7	PA'AWARU	429,780,000	33,221,850	463,001,850	401.02.02.01635-0
8	LEMBOBELALA	429,780,000	25,943,393	455,723,393	401.02.02.01631-3
9	BINTANGOR MUKTI	429,780,000	37,185,191	466,965,191	401.02.02.01523-1
10	MANDULA	429,780,000	37,735,932	467,515,932	401.02.02.01633-7
V	**KECAMATAN LEMBO**				
1	BETELEME	429,780,000	82,235,214	512,015,214	401.02.02.01623-4
2	ULUANSO	429,780,000	24,256,337	454,036,337	401.02.02.01641-6
3	MORA	429,780,000	21,879,042	451,659,042	401.02.02.01634-9
4	WARAA	429,780,000	34,182,154	463,962,154	401.02.02.01641-6
5	TINGKEAO	429,780,000	31,246,855	461,026,855	401.02.02.01639-9
6	WAWOPADA	429,780,000	34,115,338	463,895,338	401.02.02.01643-1
7	KOROWALELO	429,780,000	35,217,108	464,997,108	401.02.02.01627-2
8	TINOMPO	429,780,000	56,554,550	486,334,550	401.02.02.01640-4
9	KUMPI	429,780,000	31,077,674	460,857,674	401.02.02.01629-6
10	KOROMPEELI	429,780,000	32,001,789	461,781,789	401.02.02.01626-1
11	LEMBOROMA	429,780,000	31,641,134	461,421,134	401.02.02.01632-5
12	KOROWOU	429,780,000	102,081,403	531,861,403	401.02.02.01628-4
13	LEMBOBARU	429,780,000	24,336,407	454,116,407	401.02.02.01630-0
14	KOROBONDE	429,780,000	40,634,970	470,414,970	401.02.02.01625-8
VI	**KECAMATAN MORI ATAS**				
1	TOMATA	429,780,000	38,338,557	468,118,557	401.02.02.01604-1
2	LONDI	429,780,000	53,871,393	483,651,393	401.02.02.01567-1
3	TAENDE	429,780,000	58,754,653	488,534,653	401.02.02.01587-6
4	ENSA	429,780,000	48,074,975	477,854,975	401.02.02.01555-3
5	KOLAKA	429,780,000	39,665,172	469,445,172	401.02.02.01559-0
6	PEONEA	429,780,000	57,843,664	487,623,664	401.02.02.01542-4
7	LANUMOR	429,780,000	51,891,588	481,671,588	401.02.02.01534-5
8	GONTARA	429,780,000	26,229,833	456,009,833	401.02.02.01557-7
9	LEE	429,780,000	28,664,249	458,444,249	401.02.02.01535-7
10	SAEMBA	429,780,000	44,146,040	473,926,040	401.02.02.01545-1
11	KASINGOLI	429,780,000	34,289,830	464,069,830	401.02.02.01530-7
12	TOMUI KARYA	429,780,000	43,017,832	472,797,832	401.02.02.01606-4
13	SAEMBA WALATI	429,780,000	27,420,394	457,200,394	401.02.02.01617-9
14	PAMBAREA	429,780,000	30,573,200	460,353,200	401.02.02.01614-3

VII	**KECAMATAN MORI UTARA**				
1	ERA	429,780,000	53,039,343	482,819,343	401.02.02.01527-8
2	PELERU	429,780,000	80,012,744	509,792,744	401.02.02.01578-5
3	TAMONJENGI	429,780,000	44,351,769	474,131,769	401.02.02.01546-2
4	MAYUMBA	429,780,000	56,391,445	486,171,445	401.02.02.01516-3
5	TIWA'A	429,780,000	28,160,835	457,940,835	401.02.02.01560-6
6	LEMBONTONARA	429,780,000	62,118,304	491,898,304	401.02.02.01536-9
7	TABARANO	429,780,000	57,364,760	487,144,760	401.02.02.01586-4
8	WAWONDULA	429,780,000	60,279,898	490,059,898	401.02.02.01551-5
VIII	**KECAMATAN SOYO JAYA**				
1	LEMBAH SUMARA	429,780,000	41,133,956	470,913,956	401.02.02.01564-4
2	SUMARA JAYA	429,780,000	32,352,363	462,132,363	401.02.02.01585-2
3	TAMBAYOLI	429,780,000	54,826,797	484,606,797	401.02.02.01591-7
4	MALINO	429,780,000	36,327,974	466,107,974	401.02.02.01572-3
5	PANCA MAKMUR	429,780,000	64,920,270	494,700,270	401.02.02.01575-9
6	TAMAINUSI	429,780,000	44,886,102	474,666,102	401.02.02.01588-8
7	BAU	429,780,000	50,080,327	479,860,327	401.02.02.01553-9
8	MALINO JAYA	429,780,000	41,901,967	471,681,967	401.02.02.01569-4
9	TODDOPOLI UEBANGKE	429,780,000	53,559,665	483,339,665	401.02.02.01619-3
10	TANDOYONDO	429,780,000	44,347,761	474,127,761	401.02.02.01596-7
IX	**KECAMATAN BUNGKU UTARA**				
1	BATURUBE	429,780,000	54,042,427	483,822,427	401.02.02.01552-7
2	POSANGKE	429,780,000	78,906,443	508,686,443	401.02.02.01579-7
3	TARONGGO	429,780,000	80,617,423	510,397,423	401.02.02.01597-9
4	UERURU	429,780,000	25,444,907	455,224,907	401.02.02.01610-5
5	UEWAJO	429,780,000	61,736,873	491,516,873	401.02.02.01609-1
6	TIRONGAN BAWAH	429,780,000	47,758,143	477,538,143	401.02.02.01598-0
7	TIRONGAN ATAS	429,780,000	51,067,519	480,847,519	401.02.02.01601-4
8	SILITI	429,780,000	33,998,438	463,778,438	401.02.02.01584-1
9	LEMO	429,780,000	46,696,523	476,476,523	401.02.02.01565-6
10	SALUBIRO	429,780,000	165,221,366	595,001,366	401.02.02.01582-6
11	UEMASI	429,780,000	43,378,111	473,158,111	401.02.02.01607-6
12	OPO	429,780,000	57,637,793	487,417,793	401.02.02.01600-2
13	TANAKURAYA	429,780,000	27,903,870	457,683,870	401.02.02.01592-9
14	TAMBAROBONE	429,780,000	36,315,993	466,095,993	401.02.02.01590-5
15	WOOMPARIGI	429,780,000	30,318,954	460,098,954	401.02.02.01612-9
16	BOBA	429,780,000	38,040,486	467,820,486	401.02.02.01554-0
17	KALOMBANG	429,780,000	30,941,567	460,721,567	401.02.02.01558-9
18	TOKONANAKA	429,780,000	42,536,048	472,316,048	401.02.02.01603-8
19	MATUBE	429,780,000	73,524,054	503,304,054	401.02.02.01570-9
20	LEMOWALIA	429,780,000	54,658,543	484,438,543	401.02.02.01613-0
21	UEMPANAPA	429,780,000	44,125,121	473,905,121	401.02.02.01621-1
22	TOKALA ATAS	429,780,000	51,883,081	481,663,081	401.02.02.01602-6
23	POKEANG	429,780,000	32,731,072	462,511,072	401.02.02.01615-5
X	**KECAMATAN MAMOSALATO**				
1	PANDAUKE	429,780,000	73,417,489	503,197,489	401.02.02.01576-0
2	KOLO BAWAH	429,780,000	47,245,217	477,025,217	401.02.02.01599-3
3	KOLO ATAS	429,780,000	68,417,490	498,197,490	401.02.02.01561-8
4	MOMO	429,780,000	52,636,288	482,416,288	401.02.02.01573-5
5	TANANAGAYA	429,780,000	35,594,920	465,374,920	401.02.02.01593-0
6	UEPAKATU	429,780,000	46,674,542	476,454,542	401.02.02.01608-8
7	LIJO	429,780,000	47,057,355	476,837,355	401.02.02.01566-8
8	TANASUMPU	429,780,000	73,919,826	503,699,826	401.02.02.01594-3
9	PARANGISI	429,780,000	38,572,533	468,352,533	401.02.02.01577-3
10	GIRIMULYA	429,780,000	18,603,093	448,383,093	401.02.02.01556-5
11	WINANGOBINO	429,780,000	60,047,009	489,827,009	401.02.02.01611-7
12	TAMBALE	429,780,000	34,063,225	463,843,225	401.02.02.01589-1
13	SEA	429,780,000	94,923,305	524,703,305	401.02.02.01583-8
14	MENYO'E	429,780,000	107,862,454	537,642,454	401.02.02.01571-0
Total		**52,433,160,000**	**5,826,004,500**	**58,259,164,500**	

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

YALBERT TULAKA